

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN SAMPANG

**M. Afriandi Surya Abrata**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[surya.abrata@gmail.com](mailto:surya.abrata@gmail.com)

**KENDRY WIDIYANTO**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[kenronggo@untag-sby.ac.id](mailto:kenronggo@untag-sby.ac.id)

**DIDA RAHMADANIK**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id)

## ABSTRAK

Pembangunan infastruktur merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta yang hal ini berlangsung secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sampang. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu di Kabupaten Sampang. Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembangunan jalan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dari segi sumber daya, memiliki sumber daya manusia yang mendukung secara kualitas dan kuantitas. Sikap/Kecenderungan Pelaksana memiliki value positif dengan pribadi loyal, sigap, bangga dalam melaksanakan tugas serta semangat juang yang tinggi. Komunikasi yang dilakukan Dinas PUPR baik antar instansi, maupun internal dengan pelaksana memanfaatkan media komunikasi tertulis (naskah dinas) dan diperkuat dengan alat komunikasi pendukung. Dan Nilai budaya organisasi sangat berperan penting dalam meningkatkan peforma organisasi yang lebih baik. Dari aspek politik, lokasi anggaran yang direncanakan dalam proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Sampang masih diintervensi oleh kepentingan-kepentingan.

**Kata Kunci** : Infrastruktur, Pembangunan, Kebijakan Publik

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta yang hal ini berlangsung secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu yang menghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana, baik infrastruktur keras (yang merujuk kepada jaringan fisik seperti jalan dan bandara) maupun infrastruktur "non-fisik" atau lunak (seperti pasokan listrik, kesejahteraan sosial dan kesehatan). Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural dan secara cepat. Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan memuat larangan-larangan tertentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pedesaan di negeri ini masih merupakan suatu masalah besar yang belum bisa diatasi sampai saat ini. Daerah pedesaan di pedalaman masih sangat jauh dalam hal pembangunan, pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan juga merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertanian, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. (Pratama, Anda, 2019)

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terbagi berdasarkan kondisi geografis wilayah. Pada dasarnya setiap wilayah kepulauan membutuhkan akses sebagai ruang gerak untuk melakukan mobilitas guna mendukung tercapainya keberhasilan dalam lingkup pembangunan dan pengembangan wilayah. Setiap wilayah memiliki berbagai hal-hal yang diperlukan untuk menunjukkan kuantitas atau kualitas keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang tidak terlepas dari aspek pemahaman para aparatur selaku aparatur pembuat dan lahirnya sebuah kebijakan juga sekaligus pelaksana utama kebijakan tersebut serta potensi yang ada pada tiap wilayah yang mengarah pada pembangunan sebuah daerah. (Moch Fitra Repas Alamindah, 2016)

Jalan raya merupakan sebagai sarana serta prasarana yang digunakan sebagai penghubung antar wilayah. Jalan raya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai jalur dalam mengakses segala bentuk kebutuhannya. Seperti halnya, memberikan dukungan dalam pembangunan serta peningkatan dalam bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan bahkan kehidupan sosial masyarakat. Dilihat dari segi waktu yang digunakan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan dalam bidang infrastruktur dapat lebih menjadi lebih efektif dan efisien.

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sampang memiliki potensi infrastruktur yang dapat dikembangkan melalui wilayah darat dan laut. Pada wilayah darat, aksesibilitas Kabupaten Sampang menuju Surabaya lebih mudah. Dengan adanya jembatan Suramadu yang menghubungkan antaran pulau jawa dan pulau madura, perpindahan penduduk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi ataupun aktivitas lainnya dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Pengembangan wilayah laut juga dapat dilakukan melalui sistem transportasi laut yang berfungsi sebagai jalur perdagangan luar daerah dalam memasarkan komoditi yang dihasilkan oleh Kabupaten Sampang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan pemerintah daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang harus dilaksanakan secara holistik-tematik, integratif dan spasial serta berkesinambungan tanpa mengabaikan dampak lingkungan yang timbul akibat adanya pembangunan.

Pada saat ini Kabupaten Sampang sedang berkoordinasi mengenai permasalahan pembangunan pada Sampang Sport Center (SSC). Pada saat ini kabupaten sampang tengah membangun sampang sport center (SSC) yang berlokasi di Kelurahan Dalpenang di Kabupaten Sampang. Dalam pembangunan Sampang Sport Center (SSC) pada saat ini target realisasi diantaranya lapangan futsal, voli, basket dan juga lintasan sepeda. Namun saat ini pihak Dinas Kabupaten Sampang tengah berusaha menambah fasilitas diantaranya seperti pembangunan kolam renang, lapangan sepak bola dan juga lintasan atletik. Akan tetapi pihak Dinas Kabupaten Sampang masih mengalami kendala perihal dana yang akan digunakan dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Sampang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Administrasi Publik**

Masyarakat Indonesia pada zaman kolonial Belanda telah akrab dengan istilah administrasi karena adanya fakta terkait dengan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Kegiatan sosial dan ekonomi ini telah menjadi sarana memperkenalkan ataupun diperkenalkan secara tidak langsung terhadap istilah administrasi. Beberapa karya ilmiah memberikan bukti terhadap hal tersebut.

Masyarakat Indonesia mengenal atau secara terpaksa mengenal istilah “administrasi” ketika mereka harus berurusan dengan pemerintah setempat setingkat desa/ kelurahan dalam rangka memperoleh pelayanan surat-surat keterangan berupa keterangan penduduk yang sekarang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk; surat keterangan ketika penduduk setempat ingin menjual hasil ternaknya agar tidak disangka hewan curian, demikian pula bagi penduduk yang akan menikah harus mengurus surat keterangan nikah dari pemerintah setempat atau ketika orang tua mendaftarkan anak-anaknya pada sekolah pemeriksaan kesehatan dan pengobatan anggota masyarakat pada rumah sakit dan lain-lain kebutuhan masyarakat

yang berhubungan dengan kantor pemerintah semuanya diwajibkan membayar sejumlah uang yang disebut sebagai “biaya administrasi”.

### **Good Governance**

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan government sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik), wujud dari good governance adalah komitmen semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Masyarakat menginginkan agar pemerintah memberikan pelayanan yang, diikuti oleh perkembangan kemampuan dan kekuatan birokrat yang kuat, kuat dalam arti memiliki kekuasaan di bidang pelayanannya dan kemampuan masing-masing, sehingga pada akhirnya akan diikuti perubahan mental masyarakat pengguna layanan birokrat tadi dengan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang telah ditetapkan, serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan atau yang biasa disebut dengan policy memiliki bermacam definisi yang diberikan oleh pakar-pakar kebijakan. Sebagaimana definisi dari Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan (2009) memberi arti kebijakan sebagai “a projected program of goals, values and practices” suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Definisi kebijakan menurut Thomas R.Dye (2009) yang mendefinisikan kebijaksanaan atau kebijakan sebagai “is whatever governments choose to do or not to do” bahwa apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

### **Prinsip-prinsip Kebijakan Publik**

Prinsip-prinsip kebijakan publik merumuskan bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai 2 aspek pokok yaitu:

1. Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan klaim dari pihak- pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

### **Pembangunan**

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara satu dengan negara lain. penting bagi kita untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pembangunan. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau produk domestic bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional di

fokuskan pada peningkatan produk domestik regional bruto suatu provinsi, kabupaten, atau kota.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan dengan metode ini saya dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik, melalui metode kualitatif saya juga dapat mengenal orang secara pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka tentang permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Dimana penelitian ini juga bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini memberikan gambaran kenyataan dari kejadian yang diteliti. Selain itu juga terbatas pada usaha mengungkap suatu masalah atau keadaan dan peristiwa sebagai mana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkap fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Fokus dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial.

Lokasi yang ditentukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian terhadap implementasi kebijakan pembangunan jalan yaitu di Kabupaten Sampang. Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari peneliti lain seperti foto atau file dari catatan di instansi, atau dari mana saja sudah diolah, merupakan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik Wawancara, dilakukan terhadap Kantor Dinas PUPR Kabupaten Sampang, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dan juga teknik Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari Kantor BAPPEDA dan Bina Marga Kabupaten Sampang yang telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sampang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sampang dengan Menggunakan model Donald Van Metter dan Carl Van Horn menitik beratkan pada enam buah variabel yaitu, standar; tujuan; dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana pengaruh keenam variabel dalam model donald Van

Metter dan Carl Van Horn terhadap implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sampang.

### **Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. Hal memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah, di mana terdapat kejelasan arah yang ingin dicapai dan fleksibilitas yang diberikan sudah lebih besar dari yang sebelumnya. Artinya, daerah sudah diberi kewenangan yang lebih luas untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah termasuk didalamnya untuk pelayanan publik melalui Kebijakan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Implementasi merupakan capaian/hasil yang menjadi tujuan dari implementasi tersebut. Capaian yang hendak dicapai dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sampang.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sampang mengatakan bahwa Realisasi pembangunan infrastruktur jalan untuk mencapai kondisi jalan baik tidak dapat mencapai target sebesar 91,12% pada akhir tahun RPJMD hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi baik itu pada tatanan kebijakan anggaran maupun kondisi riil di lapangan.

### **Sumber-sumber kebijakan**

Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sampang ini, staf atau personil yang ada di Dinas PUPR, dan Bina Marga merupakan salah satu aspek sumber daya yang paling esensial dalam implementasi kebijakan alokasi infrastruktur di Kabupaten Sampang, karena banyak terjadi dalam pengimplementasian kebijakan yang gagal ternyata dipengaruhi oleh kemampuan personil yang kurang handal. Jumlah personil yang banyakpun tidak menjamin suksesnya suatu implementasi kebijakan, apabila tidak dibarengi dengan keterampilan dan keahlian. Namun di sisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik dalam implementasi kebijakan.

Terkait finansial dan fasilitas, menurut Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sampang dari Anggaran yang dimiliki Dinas PUPR untuk layanan administrasi perkantoran, anggaran sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja. Beliau menambahkan “namun dengan sejumlah dukungan sumber finansial yang dimiliki, masih ada keterbatasan pada laboratorium pengujian kekuatan aspal dan beton”. Laboratorium pengujian kekuatan aspal dan beton diperlukan untuk mengukur kualitas hasil pembangunan jalan dan jembatan.

Dengan demikian dapat kita ketahui pentingnya sumber daya keuangan bagi pembiayaan pelaksanaan kebijakan menjadikan aspek anggaran sebagai faktor yang sangat penting dalam aktivitas Kebijakan Publik. Pembahasan berkisar diantara upaya untuk memperoleh besarnya anggaran yang diperlukan, proses pengelolaannya serta pemanfaatan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, ada pendekatan bercabang dalam hal penganggaran ini, yaitu: pendekatan politik, ekonomi, hukum dan manajerial.

Dari hasil wawancara dengan Penata Kelola Jalan dan Jembatan MUDA PUPR Kabupaten Sampang, dalam Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikut sertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

### **Ciri-ciri karakteristik badan/instansi pelaksana**

Untuk mempermudah koordinasi dan memperjelas pembagian tugas dan fungsi para pelaksana, Dinas PUPR membentuk kepanitiaan yang bertugas merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur jalan yang berpedoman pada standar kebijakan yang ada. Kepanitiaan ini dibentuk berdasarkan keputusan Bupati, yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan Dinas PUPR, Bappelitbangda, dan Sekretariat Daerah. Sedangkan sebagai pelaksana teknis pembangunan infrastruktur jalannya, sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa dilakukan pemilihan stakeholder melalui lelang pengadaan barang dan jasa. Pemenang tender sebagai pelaksana teknis pembangunan infrastruktur jalan wajib melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada standar kebijakan yang ada, dan melaporkan hasilnya kepada panitia Dinas PUPR. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Bina Marga selaku perwakilan Kepala Dinas PUPR.

Kejelasan struktur yang diikuti dengan prosedur-prosedur kerja yang tepat akan memberikan dampak yang positif bagi implementasi kebijakan. Oleh karenanya struktur organisasi dan tata kerja dalam implementasi kebijakan alokasi anggaran di Dinas PUPR telah diupayakan secara optimal termasuk didalamnya aspek personil, pembiayaan dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan peningkatan pelayanan publik sehingga pencapaian terhadap sasaran dan tujuan kebijakan dapat tercapai.

### **Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi oleh karena itu Dinas PUPR Kabupaten Sampang melaksanakan rapat rapat triwulan dan rapat teragenda dan rapat rapat internal.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten (Widodo 2017). Komunikasi antar organisasi ( Dinas PU bina marga, CV AQJ Jaya dan PT. Karika Candra ) dari informasi yang diperoleh dari dinas pekerjaan umum adalah lancar dimana dalam prosesnya ada pelaporan secara berkala dan adanya pertemuan-pertemuan antar organisasi terkait pembagian tugas dan tanggung jawab juga membuktikan terjalannya komunikasi yang baik antar ketiga organisasi pelaksana dalam implemntasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sampang.

### **Sikap para pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agent pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan formulasi dari warga setempat yang memahami kendala/permasalahan yang mereka rasakan. Kecenderungan dari kebijakan yang top-down memungkinkan para pembuat kebijakan tidak mengetahui keinginan/permasalahan yang harus diselesaikan. Kecenderungan kesalahpahaman kecil di lapangan cukup sering terjadi yaitu yang berkaitan dengan teknis, namun kesalahpahaman teknis tersebut tidak merubah esensi maksud dan tujuan kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Penata Kelola Jalan dan Jembatan MUDA Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten

Sampang, "pemahaman ASN yang terlibat terhadap tujuan kebijakan tidak perlu diragukan kita selalu melakukan rapat koordinasi, namun kesalahpahaman teknis di lapangan memang sering terjadi tetapi tentunya itu tidak merubah maksud dan tujuan kebijakan itu sendiri".

Hal ini dapat terjadi karena adanya pemisahan antara para pengambil kebijakan/keputusan, dengan para pelaksana kebijakan yang memiliki kebebasan untuk menafsirkan makna, serta menentukan cara menjalankan kebijakan.

Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Perilaku ASN pelaksana pada Dinas PUPR telah memahami kebijakan yang dilaksanakan berorientasi pada pewujudan visi dan misi. Pribadi loyal, tanggap/sigap, bangga dalam bertugas serta memiliki semangat juang tinggi menjadi value positif yang dimiliki..

### **Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik**

Dalam implementasi kebijakan harusnya berfokus juga terhadap faktor eksternal (sosial-budaya-teknologi) selain dari seputar agen pelaksana maupun birokrasinya. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Isu publik yang menonjol terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sampang meliputi keterikatan antara eksekutif, legislatif, dan pelaksana. Dilihat dari aspek lingkungan politik, alokasi anggaran yang direncanakan masih diinterfensi oleh berbagai kepentingan yang tidak tertutup kemungkinan merupakan intervensi atas kepentingan pribadi atau kelompok, disebabkan kondisi di lapangan mendorong aktor kebijakan merubah prioritas yang semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

Kondisi lingkungan sosial di Kabupaten Sampang terkait implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sampang adalah sangat mendukung, masyarakat berperan aktif dalam terlaksananya implementasi kebijakan ini mulai dari pengusulan pembangunan jalan, hingga patuhnya masyarakat dalam penggunaan jalan agar proses pembanguan jalan dapat berjalan lancar. Masyarakat memahami pentingnya pembangunan jalan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai bidang seperti peningkatan dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam bidang politik adanya implementasi pembangunan infastruktur jalan di Kabupaten Sampang merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kabupaten Sampang ini, kita dapat menilai kinerja implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. sehingga, dari informasi yang diperoleh bahwa kondisi lingkungan eksternal di Kabupaten Sampang turut mendorong keberhasilan kebijakan.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan diatas dapat diartikan bahwa Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembangunan jalan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah, dengan mencapai realisasi 55,31% dari target 69, 58%. Dari segi sumber daya, Dinas PUPR memiliki sumber daya manusia yang mendukung secara kualitas dan kuantitas. Namun dari segi anggaran pembangunan infrastruktur memiliki porsi besar dalam pagu Dinas PUPR meski jika dibandingkan dengan target pembangunan tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan objek infrastruktur yang perlu dilakukan pembangunan. Karakteristik Agen Pelaksana telah



didasari standar kebijakan dalam pelaksanaannya dengan dibentuknya unit pelaksana/panitia khusus untuk menjalankan tugas mulai dari merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan dilandasi SOP/pedoman yang berlaku. Sikap/Kecenderungan Pelaksana ASN Dinas PUPR yang memiliki value positif dengan pribadi loyal, sigap, bangga dalam melaksanakan tugas serta semangat juang yang tinggi. Pelaksana memahami kebijakan yang dilaksanakan merupakan program pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi. Komunikasi yang dilakukan Dinas PUPR baik antar instansi, maupun internal dengan pelaksana memanfaatkan media komunikasi tertulis (naskah dinas) dan diperkuat dengan alat komunikasi pendukung seperti handphone dan media daring lain disamping tatap muka. Dan Nilai budaya organisasi sangat berperan penting dalam meningkatkan performa organisasi yang lebih baik. Dari aspek politik, lokasi anggaran yang direncanakan dalam proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Sampang masih diintervensi oleh kepentingan-kepentingan. Secara ekonomi, pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan IPM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- PRATAMA, ANDA, et al. ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI DESA TUK JIMUN KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN IDRAGIRI HILIR. 2019. PhD Thesis. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Eri Berlian (2016) Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: Sukubina Press.
- Harbani Pasolong (2013) Metode Penelitian Administrasi Publik.
- Silalahi, U. (2009). Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. Sinar Baru Algensindo.
- Thoha, M. (1983). Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi: Suatu Bunga Rampai Bacaan. Balai Aksara.
- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- ALAMINDAH, Moch Fitra Repas. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Barat Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Wilayah Kepanjen (Studi Di Kabupaten Malang). 2016. PhD Thesis. Universitas Brawijaya.
- Nurul Zuriyah (2006) Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prof. Dr. Sugiyono (2018) Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Pusat Statistik, B. (2022) Dalam Angka 2022 KECAMATAN SAMPANG DALAM ANGKA.
- Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik). Malang: Media Nusa Creative
- Tahalele, O. (2022). Efektivitas Komunikasi Organisasi Pada Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(5), 2357-2374.
- Sumarsono, C. W. (2021). Analisis Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
- Santoso, P., & Ningtias, I. S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 9(2), 79-95.

- Sandy, O. F. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3), 415-422.
- Pahlewi, D., Purnamasari, H., & Gumilar, G. G. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Objek Wisata Religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta Menggunakan Model Donald van Metter Dan Carl van Horn. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 412-423.
- Saepulloh, A., & Adeyadi, M. (2019). Aplikasi Scanner Berbasis Android Untuk Menampilkan Data Id Card Menggunakan Barcode. *Jurnal Manajemen Dan Teknik Informatika (J UMANTAKA)*, 3(1).
- Sondakh, S. S., Kimbal, M., & Kairupan, J. (2017). Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).